

# DAMPAK KEGAGALAN REZIM KHADAFI TERHADAP MENINGKATNYA ESKALASI KONFLIK DAN INTERVENSI GLOBAL

**Hardi Alunaza SD**

*Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura*  
[hardi.asd@fisip.untan.ac.id](mailto:hardi.asd@fisip.untan.ac.id)

**Rachma Putri**

*Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura*  
[rachmaaputri@gmail.com](mailto:rachmaaputri@gmail.com)

## ***Abstract***

*This paper aims to explain how the influence of the Gaddafi regime's failure on the escalation of conflict and global intervention. The failure experienced by the Gaddafi regime resulted in a civil war in fighting over the Libyan region which was supported by acts of rebellion from various strongholds of community alliances. Through a qualitative approach, this paper will use the principle agent theory, peacekeeping, and domino theory as a conceptual framework in describing phenomena. Data sources in this paper were obtained from literature studies in the form of literature from journals, research reports, and reliable online news to support the analysis. The results of this study show that the continuation of the Libyan conflict escalation occurred after the rise of the Melati Revolution and the Arab Spring in Libya which led to the overthrow of the Gaddafi regime which actually resulted in the formation of a war between West Libya and East Libya along with the presence of the NTC, GNC and the global intervention of the United States / NATO, the United Nations take part in mitigating the conflict to date. The escalation of the conflict that occurred not only covered the seizure of the territory but also covered all aspects of Libyan people's lives that triggered chaos, rebellion, a feeling of injustice, fear and could cause the Libyan state to step down.*

**Keywords:** *Conflict Resolution, Peacekeeping, Global Intervention*

## Pendahuluan

Libya merupakan salah satu negara di benua Afrika yang beribukota di Tripoli. Libya memiliki luas wilayah 1.759.400 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk sebesar kurang lebih 6,5 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah orang Arab dan Berber yang kurang lebih mencapai 97%, Italia sebesar 1,4% serta sisanya adalah keturunan Negro, sehingga menyebabkan Libya menjadi negara yang memiliki kebudayaan Arab walaupun negara itu terletak di benua Afrika (Isawati, 2012: 7).

Selain itu Libya dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sejak revolusi pada tahun 1969 yang menggulingkan Raja Idris, Libya dipimpin oleh Muammar Khadafi sebagai *Brother Leader* dan mengganti sistem pemerintahan. Muammar Khadafi membangun Libya dengan caranya sendiri, dengan menerbitkan Kitab al-Akhdar (Buku Hijau) yang berisi tentang buku suci politik Libya (Agung, 2011: 17). Sebagai negara penghasil minyak terbesar, Libya mendapatkan pendapatan sebesar 52,8% hanya dari penghasilan minyak bumi. Tetapi karena tindakan korupsi pemimpnnya, pembangunan yang seharusnya terjadi di Libya yang menggunakan pemasukkan dari minyak bumi pun tidak dapat terwujud. Kepemimpinan Muammar

Khadafi yang otoriter menciptakan krisis kepercayaan bagi rakyat Libya.

Dalam sepanjang sejarah rezim Khadafi sistem perimbangan kekuasaan di negara Libya ini di dominasi oleh bidang eksekutif saja, sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif tidak lepas dari pengaruh eksekutif (Presiden). Dalam sepanjang pemerintahan Libya, rezim Khadafi begitu mendominasi pemerintah. Libya menjadi negara yang sangat kaku (Agustinova, 2013: 122). Bahkan rakyatnya dilarang untuk ikut serta dalam partai politik maupun organisasi yang tentu saja ini melanggar hak-hak sebagai warga negara.

Pada saat yang bersamaan revolusi melati serta kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (*Arab Spring*) muncul. *Arab Spring* adalah gelombang revolusi di beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Yaman, Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman. Revolusi yang dimaksudkan karena munculnya rezim pemerintahan yang diktator, pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta korupsi oleh para pejabat negara. Revolusi di Libya terjadi pada tahun 2011, dilatar belakangi oleh kebijakan yang dilakukan Muammar Khadafi yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Libya.

Setelah terjadinya revolusi melati dan *Arab Spring* di Libya, rezim Muammar Khadafi yang telah berkuasa selama kurang lebih 42 tahun harus menerima berbagai perlawanan dari pasukan pro-perubahan. Munculnya perlawanan dari rakyat tidak lepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Sistem ekonomi serta politik otoriter dan tidak adanya regenerasi kepemimpinannya selama lebih dari empat dekade telah memicu semakin meluasnya gerakan protes rakyat. Rezim Khadafi dianggap gagal dalam membangkitkan negara Libya. Dengan adanya kediktatoran Muammar Khadafi dan bangkitnya revolusi melati serta *Arab Spring* menyebabkan eskalasi konflik di Libya terus berlanjut dan terpecah menjadi 3 kubu yang bertentangan, yaitu kubu pendukung Muammar Khadafi (Keluarga, Kerabat, Menteri dalam kabinet) di sebelah Libya Timur, Benghazi dan Kubu Oposisi di sebelah Barat, Tripoli yang mendirikan *National Transition Council* (NTC) serta menghendaki mundurnya Muammar Khadafi yang dianggap otoriter dan Kubu koalisi Amerika Serikat yang menghendaki Muammar Khadafi untuk diadili atau diintervensi (Humaidi, 2019).

Akibat perbedaan dukungan serta keberpihakan tersebut yang kemudian menyebabkan lengsernya Muammar Khadafi. Eskalasi konflik terus berlanjut

menyebabkan perang saudara antara Libya Barat dan Libya Timur yang sampai saat ini belum mendapatkan titik penyelesaiannya (cnnindonesia.com). Intervensi global pun turut andil dalam mengatasi kegagalan dari rezim Khadafi yang meningkatkan eskalasi konflik Libya sampai saat ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dalam hal ini bertujuan untuk membuat suatu gagasan dan analisa “Bagaimana kah efektivitas peran negara lain atau PBB dalam melakukan intervensi untuk meredakan eskalasi konflik di Libya akibat kegagalan Rezim Khadafi?”.

### **Kerangka Teoritik**

Dalam mengkaji suatu permasalahan kediktatoran atau kegagalan rezim Khadafi yang memicu revolusi Libya dan eskalasi konflik Libya hingga saat ini, penulis menggunakan beberapa teori misalnya, teori domino. Teori domino membangkitkan terjadinya revolusi di Libya seperti revolusi melati dan *Arab Spring*. Revolusi tersebut memunculkan pergerakan perlawanan terhadap rezim Khadafi yang dianggap gagal dan malah membuat konflik di Libya semakin berkepanjangan. Menurut Presiden Amerika Serikat, Dwight Eisenhower, teori domino merupakan sebuah teori untuk menggambarkan keterkaitan antara suatu ideologi dan pengaruhnya, maupun hubungan antara suatu negara atau bangsa dengan fenomena yang terjadi dalam permainan susun-bangun kartu domino (Tambaruka, 2012: 270).

Berdasarkan teori tersebut Libya dapat merasakan terjadinya perubahan agar terlepas dari kegagalan rezim Khadafi yang menghancurkan harapan masyarakat Libya untuk maju setelah sebelumnya mengalami penderitaan di rezim pemerintahan Raja Idris. Namun Khadafi tidak berhasil dan malah mengalami kegagalan lagi untuk memajukan negara Libya serta ditambah lagi dengan eskalasi konflik perang saudara dalam merebut wilayah kekuasaan hingga saat ini yang dijelaskan lebih lanjut di dalam bagian pembahasan paper ini.

Kemudian dalam mengkaji serta menjelaskan bagian peran intervensi global dalam meredakan eskalasi konflik Libya di *paper* ini, penulis menggunakan konsep *peace keeping* yang merupakan bagian dari 5 agenda PBB dalam membuat atau melaksanakan resolusi konflik internasional. Menurut John Galtung konsep *peace keeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral (Hermawan, 2007: 91). Adapun konsep *peace keeping* menurut Joanna Morrison adalah konsep yang berisi pemeliharaan perdamaian terdiri dari tindakan yang dirancang untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional yang disahkan oleh organisasi internasional dan nasional yang kompeten dan dilakukan secara kooperatif serta individual oleh militer, kemanusiaan, pemerintahan yang baik, polisi sipil dan lembaga/kelompok lain yang tertarik (Perwita & Sabban, 2015: 81).

Kemudian selanjutnya penulis memandang intervensi global yang dilakukan pihak asing seperti PBB, Amerika Serikat, NATO dalam eskalasi konflik Libya menggunakan teori *principal agent*. Menurut Duncan Snidal dan Alexander Thompson teori *principal agent*, bahwasanya melihat organisasi internasional seharusnya diperlakukan sebagai agen yang independen, yang memerankan peran aktif dan strategis mewakili *principal* nya. *Principal* disini adalah negara dan aktor-aktor lain yang berkepentingan dengan organisasi internasional itu. Teori *principal agent* juga berhubungan dengan independensi. Organisasi internasional yang dimaksudkan dalam teori ini bertindak bukan atas pengaruh politik lainnya. Hubungan antara *principal* dan *agent* ini lantas dituangkan didalam kontrak baik yang sifatnya perjanjian formal maupun

perjanjian yang tidak formal (Hennida, 2015: 131-132).

Penulis juga memandang bahwasanya intervensi global dalam meredakan eskalasi konflik Libya termasuk kaitannya dengan konsep paradigma realisme. Menurut Kenneth Waltz konsep paradigma realisme memandang intervensi kemanusiaan kaitannya dengan realis, yaitu tentang konsep kepentingan nasional (*national interest*). Bagi realis kepentingan nasional adalah faktor utama tindakan negara. Semua tindakan negara dipandu oleh kepentingan nasional. Intervensi kemanusiaan bagi realis bukan didasari oleh motivasi untuk memperjuangkan kepentingan keamanan internasional. Intervensi kemanusiaan adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan negara yang melakukan intervensi (Rosyidin, 2017: 60-61).

## Hasil dan pembahasan

### Keadaan Libya pada masa Pemerintahan Transisi dari Raja Idris ke Kediktatoran Muammar Khadafi

Karir Muammar Khadafi dimulai ketika ia berhasil melakukan kudeta terhadap Raja Idris yang dimulai pada 31 Agustus 1969 dan berhasil pada 1 September 1969. Kudeta ini dilakukan oleh Khadafi dan rekan-rekannya yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Idris. Kekecewaan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya gejolak politik yang bertepatan dengan kekalahan Mesir dalam perang Mesir–Israel selama enam hari, dalam konflik ini Raja Idris cenderung lebih memihak Israel, sehingga memicu kerusuhan yang terjadi di Tripoli dan Benghazi. Alasan kekecewaan selanjutnya karena Raja Idris telah melakukan korupsi usaha perminyakan, sejak minyak ditemukan pada tahun 1959. Setelah tumbang pemerintahannya monarki Raja Idris di Libya, Muammar Khadafi menjabat menjadi Presiden Libya pada tahun 1969. Diawal kekuasaan Khadafi, ia mulai menetapkan kebijakan anti-Barat (Rosyidin, 2017: 45).

Libya ditangan Muammar Khadafi menegaskan bahwa Libya merupakan negara Arab dengan Islam sebagai agama resmi yang mengintegrasikan prinsip Islam dengan reformasi sosial, ekonomi, dan politik. Libya ditangan Muammar Khadafi berubah menjadi negara yang radikal. Saat Muammar Khadafi menjadi pemimpin Libya, seluruh kebijakan bersumber pada satu kekuasaan, yaitu hanya pada Muammar Khadafi. Ideologi yang diterapkan merupakan perpaduan antara nasionalisme Arab dan demokrasi rakyat. Ideologi ini disebut sebagai teori universal yang terbentuk pada tahun 1973. Teori ini menurutnya sebagai jalan baru untuk menolak atheis komunis dan materialisme kapitalis. Dimana ideologi ini merupakan sebuah ideologi yang berdasarkan kebenaran dan keyakinan terhadap Allah (Munginggar, 2003: 15). Dimana rakyat Libya harus menerima ideologi tersebut bahkan ia menginginkan ideologi tersebut dapat diterima oleh bangsa Arab lainnya. Diawal ketika Muammar Khadafi memimpin, dia menyerukan persatuan Negara-Negara Arab (*Arab Unity*).

Pada tanggal 12 Juni tahun 1971 Khadafi mengumumkan pendirian partai politik, yaitu *Arab Socialist Union* (ASU). Menurut Khadafi, pada saat masa transisi kondisi negara harus kuat agar perbaikan berjalan efektif. Oleh karena itu pada masa transisi, Khadafi menciptakan partai tunggal bagi Libya. Pendirian partai politik oleh Khadafi bertujuan memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, seperti di negara lain penganut sistem partai tunggal, partai bersifat memaksa masyarakat untuk menerima persepsi dari seorang pimpinan partai (Budiarjo, 2008: 416). Sistem pemaksaan persepsi tersebut dalam perkembangan sistem kepartaian Libya pada era

rezim Khadafi menimbulkan kegaduhan di dalam partai. Mengingat bahwa masyarakat Libya yang majemuk dengan pandangan yang berbeda. Dalam perkembangannya, pada tahun 1957 Khadafi secara resmi membubarkan sistem kepartaian di Libya dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Libya No.71 tahun 1972 dimana negara melarang adanya partai politik di Libya. Peran partai politik dirasa tidak mampu mengintegrasikan berbagai golongan yang berbeda di Libya. Undang-Undang Libya No. 71 tahun 1972 juga berarti melarang adanya bentuk penyampaian aspirasi atau protes terhadap pemerintah Libya. Undang-Undang Libya No. 71 tahun 1972 juga dijadikan dasar oleh pemerintah Libya di bawah kepemimpinan Khadafi untuk menindaklanjuti individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah Libya.

Pada tahun 2002 diperkirakan 86 orang dari penggiat profesional serta mahasiswa ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara karena mereka terlibat dalam kegiatan organisasi politik Islam di Libya (Calgary, 2011). Menurut catatan *Amnesty International*, Libya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti dilakukannya penangkapan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, eksekusi di luar atau tanpa proses hukum serta kematian tahanan di dalam penjara akibat penyiksaan dan kekerasan lainnya yang menimbulkan konflik masyarakat (Amnesty International, 2010). Keberadaan organisasi massa atau kelompok kepentingan di Libya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Libya tahun 1972. Maka pemerintah Libya pada era Khadafi secara sah melakukan tindakan penangkapan atau pun kekerasan kepada individu dan kelompok kepentingan yang melanggar peraturan tersebut.

Dari segi ekonomi pemerintahan Khadafi, Libya memang sudah dikenal sebagai negara penghasil minyak terbesar. Libya mendapatkan pendapatan sebesar 52,8% hanya dari penghasilan minyak bumi. Minyak bumi Libya terkenal dengan jenis *Light Sweet* dengan kandungan sulfur yang rendah. Minyak mentah ini sangat ideal untuk diolah menjadi bensin dan solar. Diperkirakan hampir 95% produksi minyak dan gas alam Libya diekspor saat itu. Lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) Libya berasal dari sektor ini (viva.co.id). Namun disatu sisi kepemimpinan Khadafi di Libya juga memiliki dampak pada kondisi masyarakatnya secara langsung. Separuh dari penduduk Libya yang berjumlah 6,5 juta jiwa, merasakan semakin sempitnya peluang kerja. Maka dari itu jumlah pengangguran di Libya semakin bertambah. Dikarenakan kediktatoran Khadafi di berbagai bidang seperti politik dan ekonomi Libya membuat rezim pemerintahannya dianggap gagal total serta dikecam banyak pihak dan menyebabkan eskalasi konflik.

### **Berkembangnya Revolusi Melati & Arab Spring sebagai Dampak Kegagalan Rezim Khadafi**

Dampak dari teori domino mempengaruhi terjadinya revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah seperti revolusi melati dan *Arab Spring*. Teori domino merupakan sebuah teori untuk menggambarkan keterkaitan antara suatu ideologi dan pengaruhnya, maupun hubungan antara suatu negara atau bangsa dengan fenomena yang terjadi dalam permainan susun-bangun kartu domino. Pola perubahan dianalogikan seperti kartu domino yang berdiri tegak, jika kartu domino paling awal dijatuhkan maka akan menimpa kartu domino terdekat, dan proses ini berlanjut hingga kartu domino terakhir. Efek dari teori domino dikenali sebagai fenomena perubahan berantai berdasarkan prinsip geopolitik dan geo strategis. Teori ini lahir dari konsideran geografis, sehingga yang menjadi objek adalah negara- negara yang terletak berdekatan atau berada dalam satu kawasan. Teori ini jelas dapat menggambarkan situasi yang terjadi di Afrika Utara dan Timur

Tengah.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa negara Libya terletak di benua Afrika Utara. Kemudian Afrika Utara dan Kawasan Timur Tengah diguncang gelombang revolusi pada penghujung 2010 yang dikenal dengan “*Jasmine Revolution*” atau Revolusi Melati. Revolusi Melati adalah suatu istilah untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah, bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Revolusi Melati bermula di Tunisia berlanjut ke Mesir, Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya dan Suriah. Negara-negara yang bergejolak tersebut ibarat sebuah tangkai yang berada dalam satu wilayah Afrika Utara atau kawasan Timur Tengah. Satu per satu kuncup bunga dalam tangkai tersebut bermekaran mengeluarkan baunya yang harum yaitu diibaratkan sebagai peristiwa yang memicu terjadinya revolusi. Revolusi kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mempunyai banyak pemicu yang berasal dari permasalahan *intern* masing-masing negara yang bergejolak, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial.

Pada saat yang bersamaan dengan Revolusi Melati kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (*Arab Spring*) muncul. *Arab Spring* adalah gelombang revolusi di beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Yaman Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman. Revolusi yang dimaksudkan karena munculnya rezim pemerintahan yang diktator, pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta korupsi oleh para pejabat suatu negara di Timur Tengah. Dikarenakan munculnya teori domino bersamaan pengkajian dengan *Arab Spring*, maka Libya juga terkena dampak *Arab Spring* walaupun Libya tidak terletak di benua Timur Tengah.

Revolusi di Libya terjadi pada tahun 2011, dilatarbelakangi oleh kebijakan yang dilakukan Muammar Khadafi yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Libya. Muammar Khadafi telah berkuasa selama kurang lebih 42 tahun semenjak ia melancarkan kudeta pada tahun 1969. Terinspirasi dengan tentangan yang dilakukan rakyat di negara-negara tetangga seperti Mesir dan Tunisia terhadap penguasa otoriter yang berkuasa pada saat itu. Rakyat Libya kemudian melakukan aksi-aksi protes terhadap Khadafi di bulan Februari tahun 2011 dikarenakan kediktatorannya sebagai pemimpin negara. Misalnya kebebasan rakyat terkekang, tidak adanya partai politik, banyaknya pengangguran. Selain itu, selama 42 tahun berkuasa, kekayaan Muammar Khadafi dan keluarganya mencapai lebih dari 600 triliun rupiah yang tersebar di Libya, Prancis, Italia, Inggris dan Amerika Serikat. Seluruh aset dan kekayaan Muammar Khadafi bersumber dari perusahaan minyaknya yang memonopoli ladang-ladang minyak Libya dan jaringan pemasarannya. Usaha dalam rangka mempertahankan legitimasinya, Muammar Khadafi menempatkan anak-anak, keluarga, kerabat dan para pendukung fanatiknya dalam lingkaran kekuasaannya tanpa mempertimbangkan aspek profesionalitas (Suci, 2012: 121).

Kondisi Libya, dimana kepemimpinan Khadafi yang buruk menyebabkan rakyat Libya merasa kecewa kepada rezim Khadafi dengan cara melakukan aksi demonstrasi menuntut Khadafi segera turun dari jabatannya. Aksi gerakan massa yang terjadi di Libya berawal pada tanggal 15 Februari 2011. Pada saat itu warga kota Benghazi, Libya, sedang memperingati acara tahunan. Dalam rangka mengenang peristiwa pembantaian yang dilakukan pasukan Khadafi terhadap 1.200 tahanan politik di penjara Abu Salim. Pembantaian yang telah dilakukan pasukan Khadafi terhadap para tahanan adalah sebagai hukuman atas aksi protes yang telah dilakukan para tahanan pada tahun 1996 di Benghazi. Aksi demonstrasi oleh warga Libya di kota Benghazi berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan kota Benghazi, merespon aksi gerakan massa menggunakan kekerasan. Tindakan aparat keamanan kota Benghazi mendapat perlawanan dari para demonstran.

Demonstrasi yang melibatkan 300 hingga 400 orang di kota Benghazi berbalik menyerang markas polisi dan merusak bangunan-bangunan umum kota Benghazi (International Center for Study and Research into Terrorism, 2011).

Selain di kota Benghazi ratusan orang berdemonstrasi di Al Bayda dan Zintan dengan membakar kantor polisi dan gedung-gedung keamanan. Dalam kurun waktu gelombang demonstrasi tersebut semakin besar dan menyebar hampir diseluruh kota Libya seperti Tripoli, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Al Bayda dan Misrata (bbc.co.uk). Aksi demonstrasi oleh pemberontak Libya, dianggap sebagai suatu bentuk tindakan membahayakan negara. Oleh karena itu pemerintah Khadafi menanggapi aksi gerakan massa tersebut dengan kekerasan. Pemerintah Libya di bawah komando Khadafi, mengarahkan pasukan militer dengan jet-jet tempur yang terus melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para pendemo atau pemberontak Libya. Tindakan pemerintahan Khadafi yang represif dalam merespon aksi gerakan massa mendapat perlawanan keras dari sebagian rakyat Libya serta menyebabkan eskalasi konflik berlanjut.

### **Peran *National Transition Council* (NTC) Libya & Intervensi Global dalam Melengserkan Rezim Khadafi**

Tindakan represif oleh pemerintahan Khadafi yang otoriter dalam pemerintahannya juga mendapat kecaman dari negara luar seperti Amerika Serikat yang menganggap pemerintahan Khadafi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai anggota PBB yang menjunjung tinggi *peace keeping*, Amerika Serikat sangat wajar untuk mengintervensi pelanggaran HAM di Libya tersebut. Penilaian adanya pelanggaran HAM oleh Amerika Serikat di Libya karena konflik di negara tersebut berupa perang yang berlatarkan tuntutan demokrasi terhadap pemerintahan yang malah berujung mengakibatkan banyak korban jiwa yang tewas dan terluka (bbc.co.uk).

Kondisi negara Libya menjadi sangat tidak stabil. Menanggapi hal tersebut kelompok oposisi mengadakan pertemuan di Bayda. Pertemuan yang diadakan tersebut bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis konflik di Libya. Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011 di kota Benghazi, Libya. Pada momentum ini pihak oposisi membentuk *National Transitional Council* (NTC). Tujuan dibentuknya NTC oleh pihak oposisi adalah untuk mengkoordinir pemberontakan yang terjadi di berbagai kota Libya. Akibatnya, Libya terbagi 3 kubu di dalam pemerintahannya yaitu, kubu pendukung Muammar Khadafi (Keluarga, Kerabat, Menteri dalam kabinet) di sebelah Libya Timur, Benghazi dan Kubu Oposisi di sebelah Barat, Tripoli, yang mendirikan *National Transition Council* (NTC) serta menghendaki mundurnya Muammar Khadafi yang dianggap otoriter dan Kubu Koalisi Amerika Serikat, NATO yang menghendaki Muammar Khadafi untuk diadili atau diintervensi (Humaidi, Op.Cit). Dibawah pimpinan Mustafa Abdel Jalil, NTC mengkoordinir proses penjatuhannya rezim Khadafi dengan melakukan aksi pemberontakan di sebagian besar kota-kota Libya. Melihat semangat demokrasi rakyat Libya yang semakin tidak dapat dibendung, pada tanggal 5 Maret 2011 NTC mendeklarasikan diri menjadi pemerintahan yang sah mewakili rakyat Libya dan negara Libya (pemerintahan tandingan Libya). Pendeklarasian berdirinya NTC sebagai pemerintah Libya oleh pihak oposisi merupakan upaya politik dari pihak oposisi untuk menarik simpati masyarakat internasional. NTC menginginkan campur tangan pihak asing atau intervensi untuk mengatasi konflik yang terus berlanjut akibat perbedaan kubu keberpihakan di Libya.

NTC memandang Libya membutuhkan campur tangan pihak asing atau intervensi dikarenakan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas, maka dari itu perlu adanya penerapan teori *peace keeping* yang nyata di negara Libya yang tengah berkonflik. Keinginan NTC agar pihak asing melakukan intervensi terhadap penyelesaian konflik di Libya, di sambut baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB yang merupakan suatu *principal agent* tentu saja mau melakukan bantuan intervensi. Dewan Keamanan (DK) PBB pun melakukan sidang. Hasil sidang dan DK PBB adalah pengesahan Resolusi DK PBB No. 1973 pada 17 Maret 2011. Isi dari resolusi DK PBB tersebut diantaranya berisi tentang penerapan zona larangan terbang di Libya ([www.un.org](http://www.un.org)).

Resolusi ini membolehkan negara-negara asing untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas wilayah Libya. Dengan adanya larangan terbang otomatis tidak ada satu pesawat pun, kecuali pesawat untuk misi kemanusiaan dan pesawat yang diberi izin PBB dan Liga Arab, yang diperkenankan keluar atau masuk dari sejumlah bandara di Libya. Dengan diberlakukannya zona larangan terbang ini juga akan membuat Angkatan Udara Libya tidak bisa mengerahkan seluruh pesawatnya untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak. Resolusi ini mengizinkan negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi warga sipil dan daerah-daerah yang diserang pasukan Khadafi, termasuk Benghazi. Dalam resolusi ini, pasukan asing bisa melancarkan serangan udara atas pasukan Khadafi jika mereka terus memerangi para pemberontak ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)).

Resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 juga dijadikan sebagai dasar intervensi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) terhadap konflik Libya untuk melemahkan Khadafi. Keterlibatan NATO dalam krisis Libya didasari beberapa kepentingan. Kepentingan kapital dan geopolitik merupakan dua hal yang diperjuangkan. Kepentingan kapital berkaitan dengan ladang minyak yang dimiliki Libya. Libya adalah negara kaya minyak nomor 12 di dunia dengan produksi minyak mentahnya 1,6 juta barel perhari. Di lain hal, kepentingan geopolitik lebih dikaitkan dengan pergolakan politik di negara-negara Arab dan posisi strategis Libya dalam kawasan tersebut.

Dengan adanya langkah penyelesaian konflik seperti hal tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dari paradigma realisme yang memandang intervensi kemanusiaan hanya untuk mencapai kepentingan nasional negara semata bukan hanya sebagai motivasi menciptakan perdamaian. Keberadaan NATO di Libya tampak jelas sebagai bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Konflik ini membawa dalam apa yang disebut sebagai *responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi), yang sering disebut sebagai R2P.

Jika suatu negara seperti Libya, gagal melindungi rakyatnya, R2P diserahkan kepada masyarakat internasional, khususnya DK PBB (Indrawan, 2013: 136). Keikutsertaan Amerika Serikat dalam intervensi bersama NATO di Libya juga awalnya ingin menyelamatkan rakyat Libya dari tindakan otoriter yang dilakukan Khadafi terhadap rakyatnya (Mandhaga, 2013).

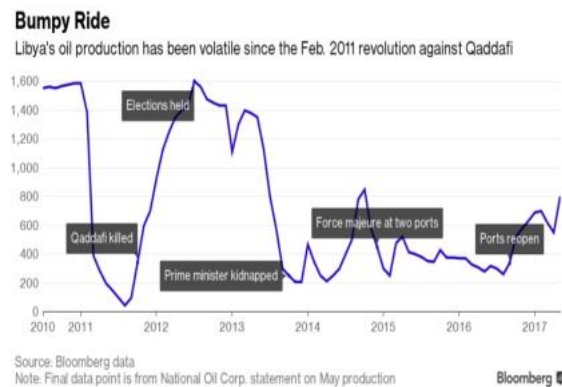
Keberhasilan NTC untuk menarik perhatian pihak asing menjadikan posisinya semakin kuat. NTC bersama pasukan NATO berupaya melumpuhkan kekuatan pasukan Khadafi dengan melakukan penyerangan di kota-kota Libya yang menjadi basis kekuatan Khadafi. Khadafi terbunuh dalam insiden baku tembak antara tentara NTC dengan pasukan loyalis Khadafi di kota Sirte ([www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)). Terbunuhnya Khadafi merupakan tanda berakhirnya rezim otoriter di Libya. NTC Libya resmi menjadi pemerintahan sementara Libya pasca terbunuhnya Khadafi dan bertugas mengawal



proses transisi menuju demokrasi di Libya sampai terselenggaranya pemilu parlemen yang demokratis pada bulan Juli 2012.

## Lengsernya Khadafi Berujung Eskalasi Konflik Libya Hingga Saat ini

**Gambar 1. Libya's oil production has been volatile since Feb, 2011 revolution against Qaddafi**



Sumber: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/libya-a-political-and-economic-trainwreck/>

Seperti yang terlihat dalam gambar diatas, keadaan tingkat ekonomi dan politik Libya setelah lengsernya Khadafi didukung oleh produksi minyak buminya yang dari ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini juga mempengaruhi seluruh sektor lainnya baik itu dari ruang lingkup keamanan dan sosial masyarakat Libya.

Pada awal tahun 2014, Libya diperintah oleh lembaga *General National Congress* (GNC), atau Dewan Nasional Umum yang memenangkan pemilu parlemen pada bulan Juli 2012 setelah lengsernya rezim Khadafi. GNC adalah sebuah majelis yang didominasi oleh para Islamis yang gagal mempertahankan kekuasaan mereka sebelum mandat berakhir, dan secara sepihak memperluas kekuasaan mereka. GNC telah menjadi sumber dari ketidakpuasan yang cukup besar bagi rakyat Libya. GNC terdiri dari 2 kelompok politik utama, yaitu partai Angkatan Aliansi Nasional (NFA) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (JCP). Perpecahan di antara partai-partai politik, diberlakukannya hukum isolasi politik, dan situasi keamanan yang tidak stabil secara terus-menerus sangat berdampak pada upaya GNC untuk menyusun konstitusi baru yang merupakan tugas utama lembaga tersebut.

Pada tanggal 25 Juni 2013, Nouri Abusahmain terpilih sebagai presiden GNC (Cafiero, 2012). Setelah pengangkatan Abusahmain sebagai presiden GNC. GNC bertugas menjaga keamanan di Libya. Abusahmain menggunakan milisi *Libya Revolutioner Operation Room* (LROR) sebagai pasukan keamanan yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan Tripoli pada bulan Agustus 2013. Selama menjabat, Abusahmain diduga menyalurkan dana pemerintah kepada milisi LROR tersebut. LROR bukan kelompok Islam bersenjata melainkan kelompok pemberontak dari kota Ghayran. Banyak warga menyalahkan GNC karena kurangnya keamanan di Libya. Sementara Pemerintah Libya sendiri berjuang mengendalikan milisi bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata yang didirikan selama revolusi di Benghazi. Selain itu mulai banyak peristiwa pembunuhan dan penculikan serta masyarakat merasakan GNC seakan menutup

situasi keamanan yang semakin memburuk di bagian Timur ([www.traffickingterrorism.org](http://www.traffickingterrorism.org)). GNC tidak ingin mundur dari pemerintahan dan pada 23 Desember 2013 secara sepihak ingin memperpanjang kekuasaannya selama setidaknya setahun. Hal ini menyebabkan kegelisahan yang meluas dan menimbulkan beberapa protes.

Pada tanggal 14 Februari 2014, Jenderal Khalifa Haftar memerintahkan pembubaran GNC dan pembentukan komite pemerintahan sementara untuk mengawasi pemilu yang baru. Tetapi GNC menolak perintah ini ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Jenderal Khalifa Haftar adalah seorang mantan perwira militer pimpinan kolonel Muammar Khadafi. Haftar turut andil dalam melakukan operasi penggulingan Khadafi. Kemudian ia melakukan pengasingan ke Virginia, Amerika Serikat. Tak lama setelah pemberontakan meletus untuk menjatuhkan Khadafi pada 2011. Haftar kembali ke Libya dan menjadi pemimpin pasukan pemberontak di Timur ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)). Kemudian pada tanggal 16 Mei 2014 tentara Jenderal Haftar melancarkan serangan darat dan udara besar-besaran terhadap kelompok pasukan Islamis di Benghazi. Dua hari kemudian, pasukan Haftar berupaya untuk membubarkan GNC di Tripoli. Konflik ini menghalangi upaya GNC yang berencana untuk mengacaukan pemilu kedua Libya pada 25 Juli 2014. Pada pemilu 2014 tersebut kelompok Islamis yang mendominasi GNC akhirnya malah menyerah dan menyatakan kekalahannya. Konflik ini pun meluas pada tanggal 13 Juli setelah pasukan Islamis melancarkan Operasi Fajar/*Libya Dawn*, yang berusaha menguasai Bandara Internasional Tripoli dalam upaya untuk memperkuat kekuasaan mereka. Gagal menguasai bandara, mereka menghancurkan sejumlah pesawat dan membuatnya tidak bisa dioperasikan. Kelompok Islamis ini mengklaim bahwa Haftar sedang mengupayakan kudeta. Kelompok milisi Islamis Ansar Al-Sharia yang terlibat dalam serangan Benghazi 2012 menuduh bahwa operasi Haftar adalah bentuk perang terhadap Islam yang didukung Barat dan mendeklarasikan pembentukan “Emirat Islam Benghazi”.

Pada 16 Mei 2014 pasukan Jenderal Haftar menyerang balik basis kelompok milisi Islam di Benghazi. Helikopter, jet dan pasukan darat dikerahkan dalam serangan itu. Serangan kelompok Khalifa Haftar tersebut menewaskan sedikitnya 70 jiwa, dan melukai kurang lebih 250 jiwa. Haftar telah bersumpah untuk tidak berhenti melakukan serangan sampai kelompok ekstremis Islam diberantas (Karadsheh, 2014).

Eskalasi konflik diatas yang terjadi di seluruh wilayah Libya masih berlanjut. Konflik antar bersenjata untuk memperebutkan wilayah sampai saat ini masih terjadi dikarenakan adanya hubungan-hubungan dengan rezim pemerintahan Libya di masa lalu dari rezim Khadafi yang gagal dan berkuasa secara diktator, kemudian menimbulkan gerakan perlawanan *National Transition Council* (NTC), serta memunculkan *General National Congress* (GNC) dan rezim kepemimpinan Jenderal Haftar bersama dengan kubu keberpihakannya masing-masing. Eskalasi konflik ini tentu saja terus menimbulkan intervensi global yang sangat mengecam atas tindakan pimpinan pemerintahan Libya yang tidak kunjung selesai berkonflik.

Krisis konflik Libya mulai meningkat pada 4 April 2019 lalu ketika pasukan Haftar melancarkan serangan militer untuk menyerbu dan menguasai Tripoli. Akibat perebutan wilayah Tripoli ini yang merupakan dampak dari kegagalan rezim Khadafi, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (United Nations OCHA) menyatakan bahwa lebih dari 50.000 orang telah mengungsi sebagai akibat langsung dari meningkatnya konflik bersenjata di Tripoli. Kemudian, menurut *World Health Organization* (WHO) setidaknya hampir 400 orang tewas dan 1.936 lainnya

terluka dalam aksi pasukan Haftar tersebut ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). PBB dengan perannya sebagai *peace keeping* dan berdasarkan teori *protected social*, karena konflik Libya ini sangat berkepanjangan maka dalam menindak lanjuti resolusi konflik internasional PBB meminta supaya pemerintah Libya di Benghazi dan Tripoli berunding pada 14 sampai 16 April 2019 untuk menentukan pemilihan umum.

Namun, rencana itu buyar setelah Haftar memutuskan menyerbu pemerintah yang didukung PBB, Tripoli ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Upaya yang ditempuh DK PBB untuk mencegah perang saudara di [Libya](#) terganjal. Penyebabnya adalah [Rusia](#) tidak sepatutnya dengan desakan DK PBB kepada pasukan loyalis Jenderal Khalifa Haftar untuk menghentikan penyerbuan ke Kota Tripoli. Rusia berkeras menolak pernyataan desakan DK PBB terkait konflik Libya. Sebab menurut mereka, seharusnya seruan itu ditujukan kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai. Penolakan Rusia atas pernyataan DK PBB soal Libya dianggap berat sebelah karena mereka mendukung Haftar, selain Uni Emirat Arab dan Mesir. Di samping itu, Rusia menuduh Amerika Serikat mengubah usulan desakan DK PBB. Usulan Inggris juga ditolak Rusia. Akhirnya, DK PBB menerbitkan pernyataan mendesak pasukan Haftar menghentikan serangan, dan tidak memancing pertikaian. DK PBB juga meminta semua pihak yang hendak merusak perdamaian Libya supaya segera ditahan. Mereka juga meminta semua badan politik di Libya mendukung konferensi nasional untuk menentukan pemilihan umum.

Misi PBB untuk Libya dinamakan *United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL) yang memiliki konsep meminta kedua pasukan yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. Haftar yang merupakan panglima Pasukan Nasional Libya, mengirim serdadunya untuk menguasai Tripoli. Haftar yang mendukung pemerintah tandingan di Benghazi menyerang pemerintah yang didukung PBB, Tripoli. Pemerintah Libya yang didukung PBB (GNA) melakukan pembalasan penyerbuan ke pasukan Haftar.

Menurut juru bicara pasukan GNA, Kolonel Mohamed Gnounou, penyerbuan pasukan Haftar bertujuan menumpas pasukan liar yang menyerang kota-kota Libya. Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Muammar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah Timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi. Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mending Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap. Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak. Di samping itu beberapa kelompok bersenjata saling serang memperebutkan banyak hal. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Bentrokan kembali terjadi terhadap penduduk di Tripoli dan kota-kota sekitarnya terancam mengalami kekeringan dan krisis air bersih, setelah pasokan air diputus oleh kelompok bersenjata yang mengaku pendukung Jenderal Khalifa Haftar. Sekelompok orang bersenjata dilaporkan telah menyerbu ruang kontrol pasokan air bersih dan memutus pasokan air ke Tripoli dan kota-kota di sekitarnya, ketika warga bersiap menghadapi datangnya musim panas. Lalu di pusat kontrol air di Jafara yang dijalankan oleh konsorsium yang dikenal dengan proyek *Great Man-Made River* atau Sungai Besar Buatan. Sungai buatan itu mengirim aliran air melalui jaringan pipa bawah tanah yang luas dari Sahara ke Tripoli, ibu kota Libya yang berpenduduk lebih dari dua juta orang, serta wilayah pesisir lainnya. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai pendukung

Jenderal Khalifa Haftar, pemimpin Tentara Nasional Libya (LNA) itu memaksa staf untuk menutup pipa air yang terhubung ke sumur bawah tanah. Pasukan Haftar yang menguasai bagian Timur dan Selatan Libya telah berusaha untuk mengambil alih ibu kota Tripoli yang dikendalikan pemerintah yang didukung PBB dan diakui internasional. Pasukan LNA telah mengepung Tripoli sejak 4 April dan disebut mendapat dukungan dari negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir. Akibat penutupan pipa air bawah tanah tersebut, pasokan air menuju Tripoli, kota Gharyan dan beberapa kota pegunungan barat lainnya telah terhenti. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan persediaan air. Insiden ini juga telah menunjukkan kerentanan struktur sipil Libya terhadap perang yang berkepanjangan internasional ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

## Kesimpulan

Seperti yang telah diketahui bahwasanya kondisi negara Libya saat ini jauh dikatakan layak untuk benar-benar ditempati. Keadaan negara Libya tidak pernah mencapai stabil dikarenakan kesalahan rezim pemerintahan yang menjabat di masa lalu, rezim Muammar Khadafi. Khadafi terkenal dengan kediktatorannya di sistem perpolitikan maupun pemerintahan, rakyat Libya sulit merasakan apa itu keadilan dengan tidak adanya partai politik yang berwenang pada masa itu, rakyat juga dibatasi untuk berorganisasi serta mengeluarkan pendapat. Tidak hanya itu keadaan ekonomi negara Libya sangat kacau walaupun Libya memiliki minyak bumi yang melimpah untuk meningkatkan pendapatan negaranya, namun dalam hal ini rezim Khadafi malah menyalahgunakan kelimpahan minyak bumi tersebut dengan mendirikan perusahaan minyak bumi yang untuk dinikmati sendiri hasilnya sebagai penambah aset kekayaan keluarga. Kegagalan rezim Khadafi ini menyebabkan eskalasi konflik yang terus berlanjut hingga sekarang. Dimana akibat kegagalannya tersebut terjadi pemberontakan perebutan wilayah serta kekuasaan Libya antara Libya Barat di Benghazi yang dikuasai pemberontak dan Libya Timur di Tripoli yang dilindungi PBB. Eskalasi konflik di Libya menimbulkan jumlah korban jiwa yang besar, pelanggaran, pelanggaran terhadap HAM, korupsi, timbulnya kelompok bersenjata, adanya jaringan kelompok teroris ISIS dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkanlah intervensi global. Eskalasi konflik juga terjadi karena adanya pemerintahan yang sama sekali tidak bisa merubah kondisi Libya dari era Khadafi yang gagal. Libya saat ini dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar yang menyebabkan kerusuhan di Libya semakin berlanjut sehingga menimbulkan intervensi global.

Intervensi global dilakukan karena Libya membutuhkan adanya suatu *responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi), yang sering disebut sebagai R2P. Jika suatu negara seperti Libya, gagal melindungi rakyatnya, R2P diserahkan kepada masyarakat internasional seperti intervensi dari negara lain atau dari Dewan Keamanan (DK) PBB. Adanya intervensi global dari Amerika Serikat dan NATO, karena mereka menganggap pemerintahan Khadafi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai anggota PBB yang menjunjung tinggi *peace keeping*, sangat wajar apabila ketiga negara tersebut mengintervensi pelanggaran HAM. DK PBB juga telah sering berupaya melakukan intervensi kepada Libya hingga saat ini dengan mengacu pada teori *protected social* karena konflik Libya yang berkepanjangan.

Dimana pada ketika pasukan Haftar beberapa bulan yang lalu melancarkan serangan militer untuk menyerbu dan menguasai Tripoli. Akibat perebutan wilayah

Tripoli ini yang merupakan dampak dari kegagalan rezim Khadafi, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (United Nations OCHA)* menyatakan bahwa lebih dari 50.000 orang telah mengungsi sebagai akibat langsung dari meningkatnya konflik bersenjata di Tripoli. Kemudian, menurut *World Health Organization (WHO)* setidaknya hampir 400 orang tewas dan 1.936 lainnya terluka dalam aksi tersebut. Upaya DK sebagai *principal agent* dalam mengatasi konflik Libya tersebut akhirnya dituangkan ke dalam *United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL)* dimana meminta kedua pasukan yang berkonflik memperebutkan wilayah kekuasaan untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. Eskalasi konflik di Libya semakin memanas saat ini bukan karena bertambahnya korban jiwa lagi tetapi karena adanya pemutusan pasokan air yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mengaku pendukung Jenderal Khalifa Haftar. Hal ini menimbulkan terjadinya kekeringan dan krisis air bersih di Libya dan membuat rakyat semakin menderita.

Walaupun hingga saat ini intervensi sudah kerap kali dilakukan dari penggulingan Khadafi yang melibatkan Amerika Serikat dan NATO yang menyebabkan konflik berlanjut hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaiannya, tetapi negara Libya tetaplah membutuhkan intervensi global tersebut. Karena status negara Libya saat ini masih kacau, perlu adanya junjungan atau bantuan yang pro kepada rakyat agar hak dan perdamaian tercapai walaupun sedang berlangsung konflik. Setidaknya adanya kepedulian negara lain melalui intervensi global mampu membuat konflik di Libya menjadi terbuka dan tidak ditutup-tutupi apabila terjadi kekerasan yang parah. Libya masih membutuhkan adanya *peace keeping* agar negara tersebut bisa tetap berdiri, tidak dicap sebagai negara yang gagal, hak asasi warga negaranya tetap terjamin.

## Referensi

### Buku & Jurnal

- Afryenti, Adinda dan Humaidi. (2019). Muammar Khadafi: Kepemimpinannya Dari Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah di Libya (1969-2011). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Vol.1 No.1 edisi Maret.
- Agustinova, Danu Eko. (2013). Latar Belakang dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 10 No.2. Edisi September. Hlm 122.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm. 416.
- D.H., Agung. (2011). *Khadafi Anjing Gila dari Sahara*. Yogyakarta: Naraso. Hlm 17.
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi. hlm. 270.
- Hermawan, Yulius. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 93.
- H., Mandhaga. (2013). *Intervensi Amerika Serikat Melalui Aliansi NATO di Libya pada tahun 2011*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Indrawan, Jerry. (2013). Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 4 No. 2. Hlm 136.
- M.A., Citra Hennida. (2015). Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral. Malang: Intrans Publishing. Hlm 131-132.
- M.A., Isawati. (2012). *Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia Barat) Jilid 1 dari Peradaban Kuno sampai Krisis Teluk 1*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm 7.
- Nabila Sabban, Nabila dkk. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 81.
- P., Muningsgar. (2013). *Skripsi: Muammad Khadafi: Kajiannya tentang Kepemimpinan di Libya 1969-2011*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm 15.
- Rosyidin, Mohammad. (2017). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis versus Konstruktivis. *Jurnal Global & Strategis*. Vol.10 No.1 Edisi Desember. Hlm 60-61.
- Suci, Afred. (2012). “Khadafi “Si Anjing Gila” dari Sahara. Konspirasi Dunia Paling Gila & Mencengangkan!. Jakarta: Wahyu Media. Hlm.121.

### Website

- Atlantic Globe. (2017). “Libya: A Political and Economic Trainwreck”. Diakses dalam [https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/libya-a-political- and-](https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/libya-a-political-and-)



- [economic-trainwreck/](#) pada 8 November 2019 pukul 16.59 WIB.
- BBC. (2011). "Libya: Pro-Qaddafi forces attack rebel-held Ras Lanuf". Diakses dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12670482> pada 14 September 2019 pukul 15.00 WIB.
- BBC. (2011). "*Ratusan Orang Demonstran Anti Pemerintah Bentrok dengan Polisi dan Pendukung Pemerintah di Kota Benghazi Libya*". Diakses dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110217\\_libya.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110217_libya.shtml) pada 14 September 2019 pukul 14.45 WIB.
- BBC. (2014). "Profile: Libya's Military Strongman Khalifa Haftar". Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-africa-27492354> pada 14 September 2019 pukul 22.46 WIB.
- Cafiero, Giorgio. (2012). Libya's First Democratic Election went Comparatively Smoothly. But It's What Comes Next that Poses The Greater Challenge. Diakses dalam <http://www.ips-dc.org/beyond-libyas-ection/> pada 14 September 2019 pukul 22.09 WIB.
- Calgary, Alberta. (2011). Foundation for Democratic Advancement Global Electoral Fairness Audit Report. Diakses dalam <http://www.slideshare.net/FDAdvancement/libya2011-fda-electoral-fairness-audit> pada 13 September 2019 pukul 23.03 WIB.
- CNN Indonesia. (2019). "*Jumlah Korban Tewas Perang Saudara Libya Jadi 47*". Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190409194315-127-384723/jumlah-korban-tewas-perang-saudara-libya-jadi-47-orang> pada 13 September 2019 pukul 21.30 WIB. Hlm 1.
- CNN Indonesia. (2019). "*Desakan PBB Terkait Konflik Internal Libya Terganjil Rusia*". Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190408165801-134-384326/desakan-pbb-terkait-konflik-internal-libya-terganjal-rusia> pada 16 September 2019 pukul 21.53 WIB.
- CNN Indonesia. (2019). "*Perang Sipil Libya Buat Ribuan Warga Tripoli Mengungsi*". Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190408181722-120-384359/perang-sipil-libya-buat-ribuan-warga-tripoli-mengungsi> pada 16 September 2019 pukul 21.40 WIB.
- Detik News. (2019). "*Hampir 400 Orang Tewas dalam Konflik Bersenjata di Tripoli Libya*". Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-4535948/hampir-400-orang-tewas-dalam-konflik-bersenjata-di-tripoli-libya> pada 14 September 2019 pukul 23.06 WIB.
- Detik News. (2011). "*PBB Setujui Zona Larangan Terbang Atas Libya, Aksi Militer Bisa Dilakukan*". Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/1595513/pbb-setujui-zona-larangan-terbang-atas-libya-aksi-militer-bisa-dilakukan> pada 14 September 2019 pukul 18.46 WIB.
- Detik News. (2019). "*Hampir 400 Orang Tewas dalam Konflik Bersenjata di Tripoli Libya*". Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d->

- [4535948/hampir-400-orang-tewas-dalam-konflik-bersenjata-di-tripoli-libya](#) pada 14 September 2019 pukul 23.06 WIB.
- Detik News. (2011). “*PBB Setujui Zona Larangan Terbang Atas Libya, Aksi Militer Bisa Dilakukan*”. Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/1595513/pbb-setujui-zona-larangan-terbang-atas-libya-aksi-militer-bisa-dilakukan> pada 14 September 2019 pukul 18.46 WIB.
- Karadsheh, Jomana. (2014). Libya Announces Elections: Will It Help Calm The Violence?” Diakses dalam <http://edition.cnn.com/2014/05/20/world/africa/libya-violence/> pada 14 September 2019 pukul 23.43 WIB.
- Kompas. (2019). “*Konflik Libya: Kelompok Bersenjata Putus Pasokan Air ke Tripoli*”. Diakses dalam <https://internasional.kompas.com/read/2019/05/21/14055201/konflik-libya-kelompok-bersenjata-putus-pasokan-air-ke-tripoli> pada 16 September 2019 pukul 22.15 WIB.
- Liputan 6 News. (2019).”*PBB: Perang Pemerintah Libya Vs Oposisi Telah Menewaskan 400 Orang*”. Diakses dalam <https://www.liputan6.com/global/read/3957887/pbb-perang-pemerintah-libya-vs-oposisi-telah-menewaskan-400-orang> pada 16 September 2019 pukul 21.33 WIB.
- Terrorism, Tracking. (2013). Libya Revolutionaries Join Operations Room LROR. Diakses dalam <https://www.trackingterrorism.org/group/libya-revolutionaries-joint-operations-room-lror> pada 14 September 2019 pukul 22.22 WIB.
- United Nations. Diakses dalam <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.html> pada 14 September 2019 pukul 18.28 WIB.
- Viva News. (2011). “*Detik-detik Tewasnya Muammar Khadafi*”. Diakses dalam [http://dunia.news.viva.co.id/berita\\_dunia/257571-detik-detik-tewasnya-moammar-khadafi](http://dunia.news.viva.co.id/berita_dunia/257571-detik-detik-tewasnya-moammar-khadafi) pada 14 September 2019 pukul 19.03 WIB.
- Viva.co.id. (2011). “*Libya Negeri Gudang Minyak di Afrika*”. Diakses dalam <https://www.google.com/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/205828-libya-negeri-kaya-minyak-di-afrika-utara> pada 11 September 2019 pukul 22.20 WIB.